



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019-2024**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO  
Jl. Lekunik - Baa**

## KATA PENGANTAR

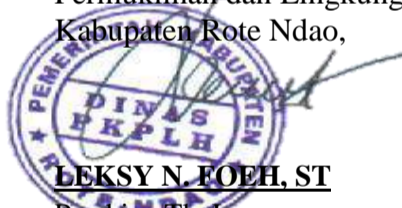
Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

RENSTRA ini merupakan formalisasi dari perencanaan strategi Tahun 2019-2024 dalam rangka tindak lanjut Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan juga untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini disusun sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman yang taktis dan strategis guna keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada khususnya dan Kabupaten Rote Ndao umumnya.

Baa, 20 Desember 2021  
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rote Ndao,



**LEKSY N. FOEH, ST**

Pembina Tk. 1

NIP. 19711118 200003 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD .....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2. Sumber Daya PD .....	11
2.3. Kinerja Pelayanan PD .....	14
2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao .....	23
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan Kabupaten .....	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	27
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI .....	29
4.1. Tujuan dan Sasarn Jangka Menengah PD.....	31
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	31
5.1. Strategi dan Kebijakan PD .....	34
5.2. Arah Kebijakan .....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	36
BAB VIII PENUTUP.....	38
LAMPRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	11
Tabel 2.2	PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	11
Tabel 2.3	PNS Berdasarkan Jabatan Struktural .....	12
Tabel 2.4	Daftar Kendaraan Dinas Tahun 2021 .....	12
Tabel 2.5	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya .....	13
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Bidang .....	14
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Bidang .....	15
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD .....	14
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD .....	15
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	21
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran RENSTRA K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	23
Tabel 3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi .....	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	29
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	33
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Struktur Bagian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao .....	10
-----------	--	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Di dalam Peraturan Bupati Rote Ndao tersebut, juga termuat Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ini merupakan penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih Tahun 2019-2024.

Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 343 Ayat 9 menyebutkan bahwa adanya penambahan kegiatan baru di dalam RKPD, ditindaklanjuti dengan adanya perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan di dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Namun dalam hal Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sampai tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun



- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
  26. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
  27. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020.
  28. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
  29. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021.
  30. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;.
- b. Menjadi payung hukum terhadap penyusunan Renja dan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024

#### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra**

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- c. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

## **Bab III Isu-Isu Strategis Permasalahan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

#### **Bab IV Tujuan Dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

#### **Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Dalam perkembangannya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah :

##### 1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok : **“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup serta bidang pertanahan”**.

##### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

##### 1. Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

## 2. Sekretaris (Sekretariat)

Tugas Pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut:

### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

### b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

### c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

## 3. Bidang Perumahan

Tugas Pokok Bidang Perumahan adalah membuat rencana operasional di Bidang Perumahan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pendataan dan Sosialisasi Perumahan, Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan, dan Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan.

Bidang Perumahan membawahi Seksi Pendataan dan Sosialisasi Perumahan, Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan, Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

### a. Seksi Pendataan dan Sosialisasi Perumahan;

Tugas Pokok Seksi Pendataan dan Sosialisasi Perumahan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pendataan dan Sosialisasi Perumahan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

- b. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan;  
Tugas Pokok Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
  - c. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan.  
Tugas Pokok Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Tugas Pokok Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah membuat rencana operasional di Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan, dan Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan.  
Bidang Perumahan membawahi Seksi Pendataan dan Sosialisasi Perumahan, Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, Seksi Pertanahan dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :
- a. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman;  
Tugas Pokok Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
  - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum;  
Tugas Pokok Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

c. Seksi Pertanahan.

Tugas Pokok Seksi Pertanahan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pertanahan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

5. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan

Tugas Pokok Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan adalah membuat rencana operasional di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan membawahi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

Tugas Pokok Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat;

Tugas Pokok Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat adalah pembuatan rencana kegiatan di Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, menevaluasi dan pelaporan.

c. Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah.

Tugas Pokok Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah adalah pembuatan rencana kegiatan di Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.



6. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan

Tugas Pokok Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan adalah membuat rencana operasional di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, Seksi Data dan Informasi Lingkungan, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan membawahi Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, Seksi Data dan Informasi Lingkungan, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

a. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;

Tugas Pokok Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Data dan Informasi Lingkungan;

Tugas Pokok Seksi Data dan Informasi Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Data dan Informasi Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

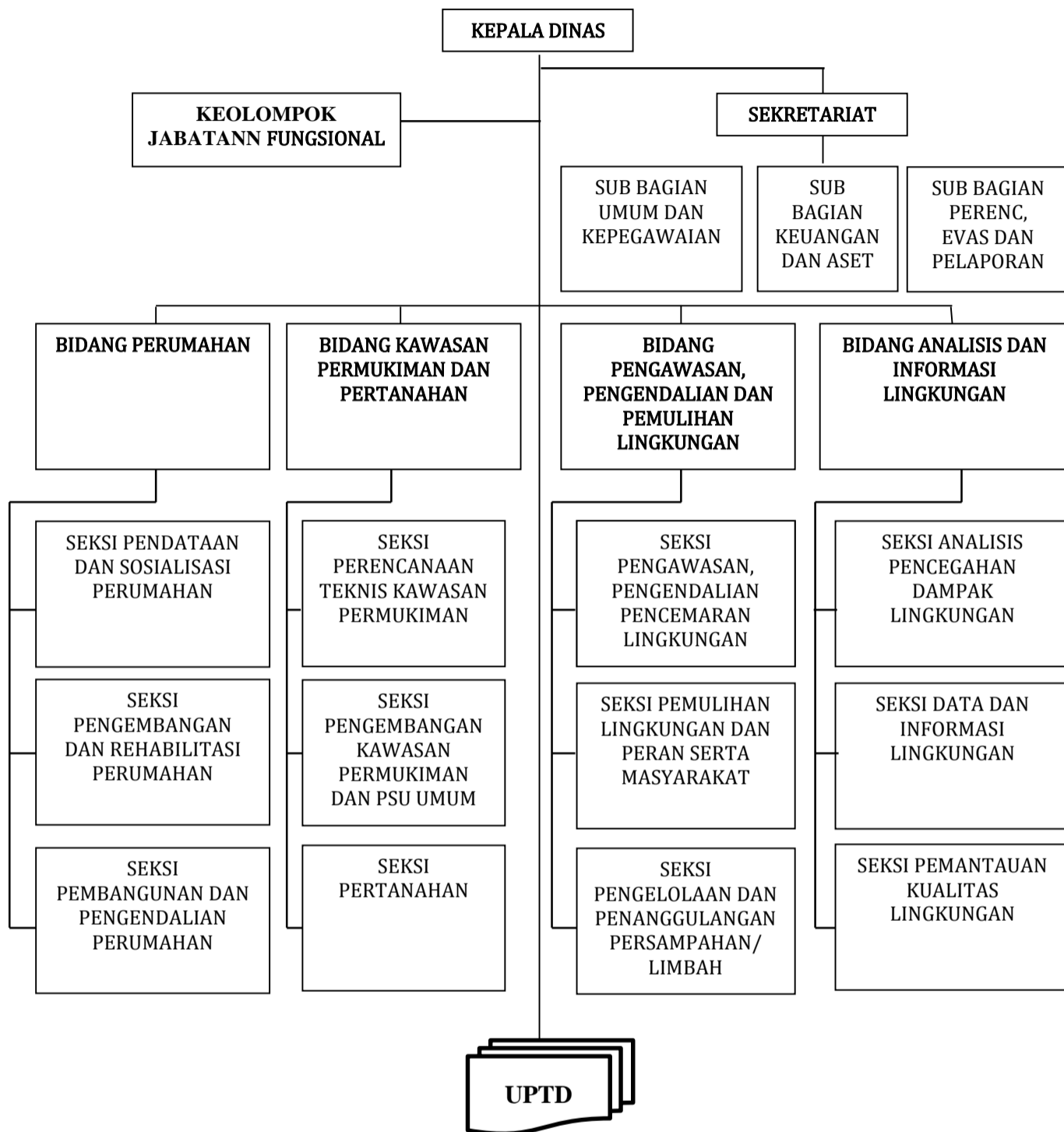
c. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Tugas Pokok Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 1.  
 Bagan Struktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dn Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Rote Ndao  
 (Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020)



Bagan Struktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao seperti tergambar di atas merupakan salah satu elemen penting yang memungkinkan beroperasinya seluruh sumber daya aparatur yang ada dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Disamping tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tersebut diatas, juga terdapat elemen lain yang turut mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu ketersediaan sumber daya.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Badan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan tersebut.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yang memiliki struktur dengan jumlah pegawai yang relatif sedikit. Secara kualitas, sumberdaya manusia aparatur yang tersedia cukup memadai namun secara kuantitas belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas secara baik.

Di bawah ini disajikan tabel-tabel sebagai gambaran potensi sumber daya manusia aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.1  
PNS berdasarkan Tingkat pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)	2	1	3
2	Sarjana (S1)	13	4	17
3	Diploma III	2	2	4
4	SLTA	9	2	11
<b>JUMLAH</b>		-	-	<b>35</b>

Tabel 2.2  
PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
2	Pembina (IV/a)	2	1	3
3	Penata Tingkat I (III/d)	7	6	13
4	Penata (III/c)	2	-	2
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	-	1
6	Penata Muda (III/a)	7	1	8
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	-	1
8	Pengatur (II/c)	1	-	1
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	3	1	4
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>9</b>	<b>35</b>

Tabel 2.3  
PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Uraian	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	IIA	1	-	1
2	Sekretaris	IIIA	-	1	1
3	Kepala Bidang	IIIB	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	IVA	8	5	13
<b>JUMLAH</b>			<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

### 2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan sarana dan prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini aset yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

#### a. Kendaraan Dinas

Tabel 2.4  
Daftar Kendaraan Dinas Tahun 2021

No.	Merk/Tipe	No. Polisi	Tahun Pembelian	Jumlah	Ket
1.	Mitsubishi/L300 BC (4x2) M/T	DH 114 YU	2007	1 Unit	Rusak Berat
2.	Suzuki/Mega Carry Extra NIK 2014	DH 9942 YU	2013	1 Unit	Baik
3.	Toyota Dyna 6 R 130 PSHT 3S	DH 9946 YU	2015	1 Unit	Baik
4.	Toyota/Dyna 130 PS HT	DH 9959 YU	2016	1 Unit	Baik
5.	Toyota WU34OR-TKMOSD3	DH 947 B	2004	1 unit	Rusak Berat
6.	Honda Win/MCB/WIN	DH 5441 YU, DH 5396 VB	2004	2 unit	Rusak Berat
7.	Honda NF 100 SL/SUUPRA FIT S	DH 5642 G	2006	1 unit	Rusak Ringan
8.	Honda NF 100 SL/SUUPRA FIT S	DH 5641 YU	2006	1 unit	Rusak Berat
9.	Honda NF 100/SUUPRA FIT S	DH 5128 YU	2007	1 unit	Rusak Ringan
10.	Honda NF 100	DH 5129 YU	2007	1 unit	Rusak Berat
11.	Yamaha/Vixion Advance	DH 5988 YU	2016	1 Unit	Baik
12.	Yamaha 2sx/Yamaha New Soul	DH 5987 YU	2016	1 Unit	Baik
13.	YAMAHA/2TP	DH 5986 YU	2016	1 Unit	Baik
14.	YAMAHA/LEXI VIN 2018	DH 3035 VB	2019	1 unit	Baik
15.	Honda/New Megapro	DH 5704 G	2011	1 Unit	Baik
16.	Yamaha/3C1 (V-IXION)	DH 5820 YU, DH 5821 YU	2013	2 Unit	Baik
17.	Honda/NF 11B2D 12M/T	DH 5888 YU	2013	1 Unit	Baik

18.	V-IXION/3C1 (V-IXION)	DH 5822 VB	2013	1 Unit	Baik
19	YAMAHA/50C (T 135 HC)	DH 5896 WH	2014	1 Unit	Baik
20.	Yamaha 50CT	DH 5899 VB	2014	1 Unit	Baik
21.	BEIJING BJRT 150-2/BEIJING	DH 5237 G, DH 5238 G	2007	2 Unit	Rusak Berat
22.	VR 150 3R/VIAR	DH 5352 G, DH 5354 G	2008	2 Unit	Rusak Berat
23.	VR 150 3R/VIAR	DH 5447 G, DH 5448 G, DH 5446 G	2009	3 Unit	Rusak Berat
24.	VR 150 3R/VIAR	DH 5774 YU	2012	1 Unit	Rusak Berat

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Tabel 2.5  
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
1	Komputer PC	Acer	6 unit	4 Baik, 2 Rusak Ringan
2	Laptop	Asus, Lenovo	9 unit	8 Baik, 1 Rusak Ringan
3	Notebook	Asus	4 unit	Rusak Ringan
4	Printer	Epson, Canon	5 unit	Baik
5	Air Conditioning	LG	3 unit	2 Baik, 1 Rusak Ringan
6	Meja Kerja Pimpinan	Informa Montana	1 Unit	Baik
7	Meja Kerja	Kayu	37 Unit	Baik
8	Meja Rapat	Kayu	5 Unit	Baik
9	Kursi Kerja Pimpinan	Informa Coucil	1 Unit	Baik
10	Kursi Tamu	Sofa	1 Unit	Baik
11	Kursi Kerja	Kayu	10 Unit	Baik
12	Rak Arsip	Kayu	16 Unit	6 Baik, 10 Rusak Ringan
13	Lemari Buku Pimpinan	Kayu	1 Unit	Baik
14	Lemari Arsip	Kayu	6 Unit	2 Baik, 4 Rusak Ringan
15	Lemari Arsip	Kaca	9 Unit	Baik
16	Global Positioning System (GPS)	Garmin	3 Unit	Baik
17	Stpwatch	Sakana	1 Unit	Baik
18	Theodolite		1 Unit	Baik
19	Camera + Attachment	Canon	2 Unit	Baik

c. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

1. Bangunan Gedung/Kantor

Adapun bangunan gedung kantor yang tercatat pada aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Bangunan Gedung Laboratorium Lingkungan;
2. Bangunan Gedung Aula Dinas PKPLH.

## 2. Tanah

Aset tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diperoleh melalui proses hibah yaitu:

- Tanah untuk pembuangan dan pengolahan sampah dengan luas 80.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Kondisi Kabupaten Rote Ndao ditinjau dari 3 bidang urusan yang menjadi tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yakni urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Rote Ndao khususnya Perumahan saat ini kondisinya masih relatif tertinggal dibandingkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya, Pendanaan pembangunan infrastuktur masih terbatas, minimnya anggaran, permohonan kegiatan/kebutuhan masyarakat lebih besar dibanding kemampuan daerah. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan masih mengalami berbagai kendala pada mind set para pelaku pembangunan.

Walaupun dengan berbagai keterbatasan dan kendala tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah dalam bidang yang menjadi kewenangan kami dengan ulasan sebagai berikut :

#### 1. Bidang Perumahan

- Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah keseluruhan. Dari tahun ke tahun Persentase rumah layak huni terus meningkat.

Kondisi urusan bidang perumahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6  
Capaian Indikator Kinerja Bidang

Indikator	2016	2017	2018	2019
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	69,58	69,93	72,06	73,95

Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam sektor perumahan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu, dilakukan dengan memaksimalkan sumber pendanaan daerah serta dukungan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan ini berhasil menaikan sekitar 3% penduduk Kabupaten Rote Ndao untuk memiliki akses akan rumah

yang layak huni. Indikator ini meningkat dari 69% di tahun 2016, 72% di tahun 2018 dan 73% di tahun 2019.

b. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian Permukiman Kumuh di Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2017 sesuai SK Bupati Nomor 408/KEP/HK/2017 sebesar 77,33 Ha terdiri dari 14,56 Ha kategori Kumuh Berat, 29,96 Ha Kategori Kumuh Sedang, 32,81 Ha kategori kumuh ringan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Rote Ndao yaitu 1.280,10 km<sup>2</sup>, maka rasio permukiman kumuh adalah 0,06%.

2. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanian

Sesuai dengan tupoksi bidang ini bertanggung jawab untuk urusan penyelenggaraan prasarana sarana utilits umum seperti pemasangan lampu penerang jalan di kawasan permukiman. Selain itu bidang ini juga menangani persoalan pengadaan tanah bagi kepentingan publik. Pada bidang ini mengalami berbagai kendala terkait sertifikasi tanah milik pemerintah. Dari berbagai persoalan yang mempengaruhi, ketiadaan data yang akurat dengan tanah milik pemerintah menjadi kendala yang signifikan. Kinerja Penyelenggaraan urusan bidang pertanian dapat diukur dengan indikator luas lahan yang bersertifikat. Dari data yang disampaikan Badan Pertanian Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 menunjukkan bahwa dari luas wilayah Kabupaten Rote Ndao sebesar 1.280,10 Km<sup>2</sup> terdapat 427 Km<sup>2</sup> yang bersertifikat atau sekitar 0,33%.

3. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan

Indikator kinerja pada bidang pengawasan, pengendalian dan pemulihan lingkungan yaitu :

Tabel 2.7  
Capaian Indikator Kinerja Bidang

Indikator	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pengelolaan sampah	39,56	38,21	33,00	39,50

Kinerja pengelolaan persampahan sampai saat ini masih sebatas pengangkutan sampah dari sumber sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Tembuangan Akhir (TPA). Total produksi sampah harian adalah sebesar 22.454 Ton pertahun sedangkan kapastas angkut saat ini adalah hanya

sebesar 1.445 Ton per tahun. Kapasitas angkut ini hanya setara dengan 6% timbulan sampah yang dihasilkan dalam satu tahun. Hal ini tentunya dipengaruhi pada ketersediaan kendaraan operasional pengangkutan sampah yang belum memadai.

Pengelolaan sampah di Rote Ndao juga belum melaksanakan prinsip pengurangan dan penanganan sampah. Fasilitas TPA yang ada hanya bersifat “*open dumping*” dan belum menerapkan teknik 3R (*reduce, reuse, recycle*), artinya sampah hanya dibuang di tempat pembuangan akhir tanpa pengelolaan lebih lanjut. Cara ini banyak menimbulkan persoalan mulai dari kontaminasi air tanah oleh air lindi, bau, ceceran sampah hingga asap. Oleh karena itu pengelolaan sampah harus dimulai dari tempat pembuangan sementara yang telah dipilah, menerapkan teknik 3R dan penerapan sanitary landfill di tempat pembuangan akhir sehingga kualitas lingkungan sekitar tetap terjaga.

Selain persoalan pengelolaan sampah, upaya pengendalian dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh bidang ini memprioritaskan pada perlindungan Mata air yang dimanfaatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pengadaan anakan untuk rehabilitasi lahan kritis.

#### 4. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan

Beberapa indikator pada bidang analisis dan informasi lingkungan yaitu indikator Indeks Kualitas Air. Indikator indeks kualitas air dilakukan dengan tahapan pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan dan pegujian/analisa laboratorium serta evaluasi hasil analisa laboratorium. Indeks kualitas air di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2019 berada pada angka 0,68 atau pada kondisi baik dan memenuhi baku mutu. Sedangkan pemantauan terhadap kualitas udara dan tutupan lahan belum dilakukan.. Dalam proses pengukuran indeks kualitas air, ada beberapa kendala yang dihadapi. Terbatasnya tenaga yang kompeten merupakan salah satu dari beberapa kendala yang dimaksud. Situasi ini menjadi pemicu sehingga perangkat daerah harus mendatangkan tenaga ahli dari luar kabupaten untuk terlibat dalam proses pengukuran. Disamping itu, keterbatasan peralatan dan fasilitas pendukung juga menjadi kendala sehingga sampel air yang ada harus dibawa ke Kupang untuk diperiksa. penanganan aduan masyarakat terhadap usaha yang berpotensi merusak lingkungan.



Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Rasio rumah layak huni			0,16	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	100	100	100
2	Rasio permukiman layak huni			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	100	100	100
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			69,58	69,93	72,06	69,58	69,93	72,06	100	100	100
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau			3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	100	100	100
5	Persentase permukiman yang tertata				0,50	0,50		0,50	0,50		100	100
6	Lingkungan permukiman kumuh				0,06	0,06		0,06	0,06		100	100
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				0,00	0,00		0,00	0,00			
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan				2,34	2,34	2,34	2,34	2,34		100	100
9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU			-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tersusunnya dokumen RPPLH Kabupaten			-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten			-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi			-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hasil pengukuran indeks kualitas air			-	0,68	0,68	-	0,68	0,68			
14	Hasil pengukuran indeks kualitas udara			-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan			-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup			-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani			5,8	16,6	16,6	16,6	5,8	16,6	16,6	100	100
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R			-	-	0,37	-	-	0,37	-	-	100
20	Persentase jumlah sampah tertangani			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Uraian		Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran Tahun ke -		Rasio antara realisasi dan dan Anggaran Tahun ke -		Rata rata pertumbuhan	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2018	TAHUN 2019	ANGGARAN	REALI SASI
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>1.040.199.500</b>	<b>985.625.200</b>	<b>1.027.105.466</b>	<b>969.619.081</b>	<b>98,74</b>	<b>98,38</b>		
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100		
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.000.000	28.300.000	25.974.966	27.548.680	97,22	97,35		
3	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000	10.000.000	7.841.400	2.342.300	78,41	23,42		
4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	145.000.000	140.700.000	145.000.000	140.665.000	100	99,98		
5	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100		
6	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100		
7	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100	100		
8	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	22.000.000	21.997.000	22.000.000	99,99	100		
9	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.200.000	2.000.000	7.200.000	2.000.000	100	100		
10	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	121.539.000	70.195.200	121.539.500	70.195.200	100	100		
11	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	297.660.000	363.180.000	291.750.600	362.865.444	98,01	99,91		
12	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran	135.000.000	80.000.000	134.300.000	80.500.000	99,48	100		
13	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah provinsi NTT	237.800.000	232.750.000	235.502.000	225.502.457	99,03	96,89		

<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>43.460.500</b>	<b>6.465.000.000</b>	<b>43.416.000</b>	<b>574.300.000</b>	<b>99,90</b>	<b>8,88</b>		
1	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	25.000.000	-	24.375.000		97,50		
2	Kegiatan Pengadaan/pembelian/pembebasan tanah	-	5.150.000.000	-	4.370.000		0,08		
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	500,000,000	-	477.995.000		95,60		
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.460.500	40,000,000	43.416.000	40.000.000	99,90	100		
5	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	750,000,000	-	27.560.000		3,67		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>146.240.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>138.859.698</b>	<b>76.302.000</b>	<b>94,95</b>	<b>63,59</b>		
1	Kegiatan Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Aparatur	146.240.000	120.000.000	138.859.698	76.302.000	94,95	63,59		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		-	<b>10.000.000</b>	-	<b>9.947.000</b>		<b>99,47</b>		
1	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	10.000.000	-	9.947.000		99,47		
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>		<b>425.000.000</b>	<b>447.300.000</b>	<b>350.471.793</b>	<b>350.850.000</b>	<b>82,46</b>	<b>78,44</b>		
1	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	375.000.000	362.000.000	300.471.793	265.550.000	80,13	73,36		
2	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100	100		
3	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	35.300.000	-	-				
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>3.459.247.000</b>	<b>9.734.296.000</b>	<b>3.401.564.700</b>	<b>9.204.596.500</b>	<b>98,33</b>	<b>94,56</b>		
1	Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	275.000.000	200.000.000	219.618.100	167.599.700	79,86	83,80		
2	Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	-	72.220.000	-	53.417.400		73,96		
3	Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu	3.088.197.000	9.221.426.000	3.088.197.000	8.821.861.800	100	95,67		
4	Kegiatan Implementasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-	240.650.000	-	161.717.600		67,20		
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan	96.050.000	-	93.749.600	-	97,60			

<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>		<b>100.000.000</b>	<b>255.000.000</b>	<b>98.150.000</b>	<b>86.682.380</b>	<b>98,15</b>	<b>33,99</b>		
1	Kegiatan Sertifikasi Tanah	100.000.000	255.000.000	98.150.000	86.682.380	98,15	33,99		
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>1.440.000.000</b>	<b>3.652.258.800</b>	<b>1.253.913.400</b>	<b>2.147.403.017,04</b>	<b>87,08</b>	<b>58,80</b>		
1	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	-	150.000.000	-	149.254.000		99,50		
2	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	50.000.000	50.000.000	47.183.000	49.574.600	94,39	99,15		
3	Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	50.000.000	50.000.000	49.742.000	49.950.000	99,48	99,90		
4	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	49.950.000	100	99,90		
5	Kegiatan Pencegahan, Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup	880.000.000	2.367.258.800	831.966.000	1.237.871.908,04	94,54	52,29		
6	Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	410.000.000	985.000.000	275.012.200	610.802.509	67,08	62,01		
<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>		<b>-</b>	<b>484.000.000</b>	<b>-</b>	<b>444.663.458,36</b>		<b>91,87</b>		
1	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	-	484.000.000	-	444.663.458,36		91,87		
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>		<b>850.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>816.239.050</b>	<b>293.581.000</b>	<b>96,03</b>	<b>99,52</b>		
1	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang Jalan	295.000.000	295.000.000	282.900.000	293.581.000	95,90	99,52		
2	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan dan Pemasangan Energi Baru Terbarukan	555.000.000	-	533.339.050	-	96,10			
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		<b>326.300.000</b>	<b>362.045.000</b>	<b>325.870.000</b>	<b>360.948.000</b>	<b>99,87</b>	<b>99,70</b>		
1	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	326.000.000	362.045.000	325.870.000	360.948.000	99,87	99,70		
<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>		<b>34.254.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>33.867.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>98,87</b>	<b>100</b>		
1	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	34.254.000	75.000.000	33.867.000	75.000.000	98,87	100		
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup</b>		<b>50.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>49.400.000</b>	<b>21.923.000</b>	<b>98,80</b>	<b>29,23</b>		
1	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	50.000.000	75.000.000	49.400.000	21.923.000	98,80	29,23		

<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>		<b>30.000.000</b>	<b>530.000.000</b>	<b>29.868.000</b>	<b>509.845.000</b>	<b>99,56</b>	<b>96,20</b>		
1	Kegiatan Penataan RTH	-	500.000.000	-	480.245.000		96,05		
2	Kegiatan Adiwiyata	30.000.000	30.000.000	29.868.000	29.600.000	99,56	98,67		
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>		<b>9.953.943.000</b>	<b>3.045.046.000</b>	<b>9.235.583.100</b>	<b>2.999.198.000</b>	<b>92,78</b>	<b>98,49</b>		
1	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	9.753.943.000	2.825.046.000	9.046.735.400	2.814.579.000	92,75	99,63		
2	Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	200.000.000	220.000.000	188.847.700	184.619.000	94,42	83,92		
<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>		<b>4.444.682.000</b>	<b>4.644.405.900</b>	<b>4.266.126.100</b>	<b>4.436.046.822,87</b>	<b>95,98</b>	<b>95,51</b>		
1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat	3.244.682.000	4.644.405.900	1.065.000.000	4.436.046.822,87	88,75	95,51		
2	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	1.200.000.000	-	3.201.126.100	-	98,66			
<b>Total Anggaran</b>		<b>22.343.326.000</b>	<b>31.179.976.900</b>	<b>23.347.057.089</b>	<b>22.560.905.259,27</b>	<b>94,65</b>	<b>72,36</b>		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

### a. Tantangan :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
2. Masih rendahnya alokasi anggaran;
3. Belum lengkapnya basis data dan informasi untuk masing-masing bidang;
4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur perumahan dan PSU;
5. Masih rendahnya kesadaran berbagai pemangku kepentingan (OPD, Masyarakat, Swasta) tentang pentingnya pembangunan yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;
6. Masih minimnya regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
8. Belum dimaksimalkan secara optimalnya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
9. Meningkatnya usaha yang berdampak pada pengrusakan dan pencemaran lingkungan;

### b. Peluang

1. Pembangunan yang berbasis pada prinsip berkelanjutan menjadi arus utama pembangunan baik di level global, nasional dan daerah;
2. Kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan oleh semua pemangku kepentingan mulai meningkat setelah ditetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs);
3. Prioritas pembangunan Nasional dan daerah yang menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat miskin;
4. Orientasi dalam RTRW menitikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana berupa jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten;
5. Meningkatnya kesadaran akan perlunya penyediaan regulasi pengelolaan lingkungan serta upaya penegakan aturan-aturan dimaksud;
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;
7. Adanya jejaring kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat Pihak swasta dan NGO dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Dari sisi SDM manusia tersedia banyak tenaga ASN muda yang memiliki latar belakang kemampuan teknis yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas PKPLH.

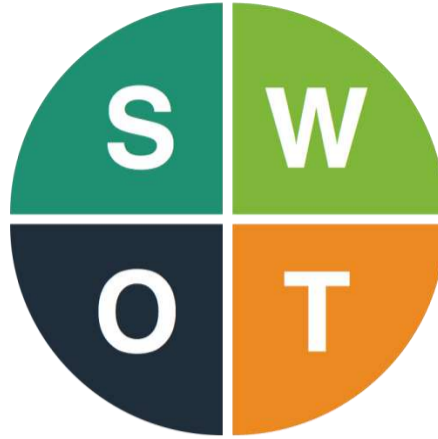
# SWOT ANALYSIS

## Strengths

- Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan access infrastruktur dasar dalam RPJMD, RTRW
- Adanya Kebijakan dan strategi Daerah tentang sampah Pengelolaan Rumah Tangga
- Adanya Peraturan Daerah tentang tata bangunan
- Adanya Jejaring DPKPLH dengan berbagai pihak
- Adanya Dedikasi dan komitmen aparaturnya DPKPLH dalam menjalankan Tupoksinya

## Opportunities

- Adanya Komitmen dan Prioritas kebijakan Pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan infrastruktur dasar
- Adanya Komitmen dunia Internasional dalam SDG's
- Meingkatkan perhatian Masyarakat, swasta, LSM, Organisasi masyarakat akan isu lingkungan
- Adanya peluang pendanaan dari pihak luar



## Weaknesses

- Keterbatasan anggaran
- Keterbatasan Sarana Prasarana
- Keterbatasan SDM
- Belum memadainya regulasi lingkungan
- Belum optimalnya manajemen data dan informasi

## Threats

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan isu lingkungan dan standar bangunan
- Meningkatnya dampak negatif perubahan iklim (kekeringan dan penyakit berbasis lingkungan)
- Rendahnya ketaatan pelaku usaha akan dokumen lingkungan
- Meingkatkan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pemukiman
- Meningkatnya volume dan jenis sampah



- Memaksimalkan Implementasi arah kebijakan RTRW dan RPJMD terkait penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan persampahan dalam Renstra DPKPLH
- Memaksimalkan Implementasi Perbup tentang Jakstrada Sampah Rumah Tangga
- Memaksimalkan dukungan pendanaan dari pusat dan provinsi
- Peningkatan kualitas SDM aparaturnya yang kompeten



- Memaksimalkan sumber pendanaan untuk penanganan masalah prioritas serta upaya mencari sumber pendanaan lain
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparaturnya
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan dan standar bangunan
- meningkatkan ketaatan pelaku usaha melalui pengawasan dan penerapan insentif disinsentif



- Meemprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar
- Meningkatkan upaya pengelolaan persampahan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan dan standar bangunan
- meningkatkan ketaatan pelaku usaha melalui pengawasan dan penerapan insentif disinsentif



- Memaksimalkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyempurnaan regulasi daerah
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna lingkungan
- Meningkatkan manajemen data dan informasi lingkungan
- Melibatkan LSM, Universitas dan pihak luar dalam kegiatan pelestarian lingkungan

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO**

Pada bagian perumusan isi-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Provinsi.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.**

Tabel 3.1  
 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur perumahan	Masih terdapat banyak rumah tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecenderungan masyarakat membangun RTLH untuk mendapat bantuan dari pemerintah</li> <li>- Belum adanya payung hukum penetapan database RTLH untuk 5 tahun</li> <li>- Terbatasnya alokasi anggaran</li> </ul>
2.	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya manajemen pengelolaan sampah</li> <li>- Belum optimalnya pengujian kualitas air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah</li> <li>- Terbatasnya sarpras persampahan</li> <li>- Terbatasnya SDM Lingkungan Hidup</li> <li>- Belum berfungsinya laboratorium lingkungan hidup</li> <li>- Terbatasnya alokasi anggaran</li> </ul>

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Terpilih**

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024.



Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2019 – 2024, yaitu :

a. Visi : **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”**.

b. Misi :

Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan meliputi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan di dukung oleh Pertanian dan Perikanan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut, terutama pada *Misi ketiga* : **Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.**

### 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan Kabupaten

Keterkaitan Renstra DPKPLH dan Renstra kementerian/Lembaga terkait diperlukan untuk membangun sinergitas pelayanan dalam bentuk arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini. Berdasarkan Tupoksi yang tetuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Rote Ndao urusan yang ditangani oleh DPKPLH terbagai dalam dua kementerian yakni Kementerian PU yakni Dirjen Cipta Karya serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu ulasan dalam bagian ini akan dibagi dua yakni keterkaitan Renstra DPKPLH terhadap Renstra Dirjen Cipta karya serta Keterkaitnya dengan Renstra Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao  
Berdasarkan Sasaran Renstra Dirjen Cipta Karya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<i>Renstra Dirjen Cipta Karya</i>			
1.	Penurunan lingkungan kumuh perkotaan dan perdesaan menjadi 0 % melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar pemukiman dengan pendekatan fisik dan non – fisik	Masih tingginya permasalahan rumah yang tidak layak huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan</li> <li>2. Terbatasnya data dan informasi</li> <li>3. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya prioritas kementerian</li> <li>2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.</li> <li>3. Komitmen daerah dalam RPJMD untuk menuntaskan masalah rumah tidak layak huni</li> </ol>
2.	Peningkatan strategi pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan	Masih rendahnya pengelolaan sampah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan dana</li> <li>2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah</li> <li>3. Keterbatasan SDM</li> <li>4. Masih belum memadainya manajemen pengelolaan sampah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya prioritas kementerian</li> <li>2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.</li> <li>3. Komitmen daerah dalam RPJMD untuk menuntaskan masalah rumah tidak layak huni</li> </ol>

<i>Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>			
3.	Pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah 30 %	Pengurangan sampah masih 0 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan penganggaran</li> <li>2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan</li> <li>3. Belum ada kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan</li> <li>4. Terbatasnya sarana prasarana persampahan</li> <li>5. Keterbatasan SDM</li> <li>6. Masih belum memadainya manajemen pengelolaan sampah</li> </ol>
4	Pengelolaan sampah melalui penanganan sampah 70 %	Penanganan sampah masih 0 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya prioritas kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi terkait pengelolaan sampah</li> <li>2. Adanya komitmen Daerah melalui penetapan Jakstrada sampah dalam Perbub</li> <li>3. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.</li> </ol>
5.	Peningkatan kualitas lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas air</li> <li>• Kualitas udara</li> <li>• Kualitas tutupan lahan</li> </ul>	Kondisi lingkungan Rote Ndao masih berada pada ambang batas yang baku mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya aktifitas pembangunan yang mengancam penurunan kualitas lingkungan</li> <li>2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah</li> <li>3. Ketaatan terhadap dokumen lingkungan dari pelaku usaha yang rendah</li> <li>4. Masih rendahnya pemantauan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan</li> <li>5. Masih belum memadainya regulasi</li> <li>6. Masih terbatasnya SDM</li> </ol>

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada sub bab ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3  
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi DPKPLH	Permasalahan Pelayanan DPKPLH Kabupaten Rote Ndao	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengelolaan persampahan	Masih sangat rendahnya upaya pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya penganggaran terkait peningkatan akses masyarakat akan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>• Keterbatasan SDM</li> <li>• Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</li> <li>• Belum tersedianya perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan tentang penyediaan akses masyarakat akan pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan isu infrastruktur dasar dan lingkungan hidup</li> <li>• Adanya komitmen daerah dalam penanganan infrastruktur pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD</li> <li>• Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya</li> </ul>
2	Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman	Belum adanya deliniasi/batas-batas zonasi permukiman yang jelas (belum adanya detail tata ruang perkotaan) sehingga pembangunan permukiman tidak salah lokasi		
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Belum maksimalnya penataan RTH		

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.**

Berdasarkan telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan tersebut maka dapat ditetapkan isu – isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan kewenangan DPKPLH. Isu – isu strategis ini merupakan prioritas pelayanan DPKPLH dalam lima tahun kedepan.

1. Isu Strategis Bidang Perumahan
  - a. Masih terdapat banyak rumah yang tidak layak huni;
  - b. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman.
2. Isu Strategis Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  - a. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatkan tanah
  - b. Masih rendahnya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk mendukung berbagai aktifitas masyarakat Desa
3. Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup
  - a. Meningkatnya aktifitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan
  - b. Masih sangat rendahnya upaya pengelolaan persampahan
  - c. Belum memadainya regulasi yang berisi insentif bagi pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan
  - d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan Perencanaan Kabupaten Rote Ndao sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan perencanaan tersebut. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”**. Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempedomani misi ke-3 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 sebagai berikut: **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”**.

### **1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

#### **1.1.1 Tujuan**

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dirumuskan untuk menjabarkan misi ketiga sesuai RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.

#### **1.1.2 Sasaran**

Sasaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yaitu :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan;
- b. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c. Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Perbaikan rumah tidak layak huni (Unit)		75,23 (4.262)	5.589	7.539	9.414	11.264
			Luas lahan bersertifikat (Ha)		46	92	138	184	230
			Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya (Ha)		1.582	1.582	1.582	1.582	1.582
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Meningkatnya pengelolaan sampah (%)		17,56	24,00	26,00	27,00	30,00
		Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks kualitas air (Poin)		0,68	62,08	62,18	62,28	62,38

#### **4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam proyeksi 5 (Lima) Tahun kedepan mengacu pada Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai tolak ukur kinerja pengembangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama periode 5 Tahun kedepan maka perlu ditetapkan indikator kinerja dan program.

Dalam menyusun indikator kinerja diperlukan pemahaman yang baik tentang kegiatan, tujuan, sumber daya yang tersedia, ruang lingkup kegiatan, keterkaitan dengan kegiatan lain untuk memperoleh hasil, manfaat dan dampak yang diharapkan.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.**

Dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah di Kabupaten Rote Ndao untuk mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan, permukiman dan utilitas umum;
2. Meningkatkan pengurusan administrasi pertanahan
3. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan Visi, misi dan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan, kawasan permukiman dan utilitas umum;
2. Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Memperkuat dokumen pendukung untuk proses sertifikasi tanah;
4. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan;
5. Pengambilan dan pengujian sampel air;
6. Penguatan data lingkungan;
7. Perlindungan sumber-sumber mata air;
8. Meningkatkan pelayanan perizinan lingkungan yang integratif dan terpadu;
9. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi melakukan pencemaran;
10. Rehabilitasi lahan kritis;
11. Meningkatkan penanganan sampah;
12. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
13. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah 3R;

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan</b>			
<b>MISI 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur</b>			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
1. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan, permukiman dan utilitas umum	1. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan, kawasan permukiman dan utilitas umum 2. Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
		Meningkatkan pengurusan administrasi pertanahan	3. Memperkuat dokumen pendukung untuk proses sertifikasi tanah.
2. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan	4. Penguatan data lingkungan 5. Perlindungan sumber mata air 6. Meningkatkan pelayanan perizinan lingkungan yang integritas dan terpadu; 7. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi melakukan pencemaran; 8. Rehabilitasi lahan kritis 9. Meningkatkan penanganan sampah 10. Penyediaan sarpras persampahan 11. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah 3R
	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan	12. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan 13. Pengambilan dan pengujian sampel air

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Program prioritas penetapannya mengacu pada Program pada RPJMD Tahun 2019-2024. Kabupaten Rote Ndao selanjutnya dijabarkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai unit pelaksana kegiatan.

Adapun program-program untuk mencapai sasaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tabel 6.1 (lampiran).

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup selama periode lima tahun dengan prioritas program beserta indikator kinerja program. Dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program pembangunan daerah, yaitu program yang merupakan prioritas kepala daerah terpilih untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta program penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan program prioritas Perangkat Daerah berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode RPJMD. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program, setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan *Misi ketiga*, yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur”**, pencapaian kinerjanya dilaksanakan melalui Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Urusan Pertanahan dan Bidang Urusan Lingkungan Hidup..

Berikut ini disajikan tabel tentang Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019 – 2024, sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Yang Mengacu  
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	TARG ET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET	REALISASI	TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					TAHUN 2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Perbaikan rumah tidak layak huni (unit)				73,95	75,23	4.262	5.589	7.539	9.414	11.264	11.264
2	Meningkatnya pengelolaan sampah (%)				11,93	17,56	17,56	24,00	26,00	27,00	30,00	30,00
3	Indeks kualitas air (Point)					0,68	50,00	62,08	62,18	62,28	62,38	62,38
4	Luas lahan bersertifikat (ha)					46	46	92	138	184	230	230
5	Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya (Ha)					1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Perubahan Renstra dilaksanakan karena untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renstra Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Bagian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Perubahan Renstra Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Perubahan Renstra Bagian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Rote Ndao 2019-2024, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Baa, 20 Desember 2021

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rote Ndao,



**LEKSY N. FOEH, ST**

Pembina Tk. I

NIP. 19711118 200003 1 003

## **LAMPIRAN**



Tabel 6.1  
Rencana program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao  
Tahun 2019-2020 Sebelum Perubahan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (autcam) dan kegiatan (auput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													
						2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI						
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)								
Meningkatkan kinerja operasional kantor DPKPLH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	1	04	1	04	01	01		<b>PROGRAM :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		2,215,430,000		1,589,569,000		3,804,999,000	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO
		1	04	1	04	01	01	01	<b>KEGIATAN:</b> 1 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	83,300,000	12	88,300,000	24	171,600,000		
		1	04	1	04	01	01	03	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja, pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12	55,000,000	12	60,000,000	24	115,000,000		
		1	04	1	04	01	01	04	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	7 Orang	7	140,700,000	8	129,300,000	15	270,000,000		
		1	04	1	04	01	01	05	4 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan profil OPD, Renja OPD, LKPJ, LPPD, LKIP, Evaluasi Renja, Review Renstra	7 Dokumen	7	10,000,000	7	15,000,000	14	25,000,000		
		1	04	1	04	01	01	05	5 Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	72 Kali	72	676,430,000	60	284,469,000	132	960,899,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (autcam) dan kegiatan (auput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
						2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)				
		1 04 1 04 01 01 09	6	Rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas, aula, gudang, parkir, selasar, pelataran, pagar dan bangunan pelengkap gedung lainnya	Rehabilitasi sumur bor dan instalasi di kantor Bupati	1 Paket	1	500,000,000	1	162,500,000	2	662,500,000			
		1 04 1 04 01 01 10	7	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Jabatan	Pembangunan selasar Rumah Jabatan	1 Paket	1	750,000,000	1	850,000,000	2	1,600,000,000			
Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	1 04 1 04 01 15	PROGRAM :	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Permukiman Layak	73.95%	73.95%	16,910,831,900	75.23	15,715,882,002	75.23	32,626,713,902	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO	
		1 04 1 04 01 15 02	KEGIATAN:	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Terlaksananya pembangunan septictank individu	514 Unit	514	2,825,000,000	672	3,600,217,000	1,186	6,425,217,000		
		1 04 1 04 01 15 03		2	Koordinasi dan Monitoring Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan pengendalian PAMSIMAS	10 Desa	10	220,000,000	10	193,524,000	20	413,524,000		
		1 04 1 04 01 15 05		3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat	Terlaksananya pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan	1330 SR	1,330	4,644,405,900	602	3,279,168,002	1,932	7,923,573,902		
		1 04 1 04 01 15 06		4	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	525 Unit	525	9,221,426,000	248	8,642,973,000	773	17,864,399,000		
Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis daerah	Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan	2 04 1 04 01 15	PROGRAM :	PROGRAM PENATAAN PERTANAHAN	Meningkatnya Luas Lahan Bersertifikat	7.44%	7.44%	5,405,000,000	7.63%	5,008,618,760	46 Ha	10,413,618,760	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO	
		2 04 1 04 01 15 01	KEGIATAN:	1	Sertifikasi Tanah	Terlaksananya sertifikasi tanah PEMDA	25 Bidang	25	255,000,000		768,760	25	255,768,760		
		2 04 1 04 01 15 02		2	Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah	1 Hektar	1	5,150,000,000	2	5,007,850,000	3	10,157,850,000		
Meningkatkan pengelolaan persampahan	Meningkatnya kebersihan kota	2 05 1 04 01 15	PROGRAM :	PROGRAM PENGENDALIAN DAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	11.93%	11.93%	3,141,303,800	17.56	452,000,000	17.56	3,593,303,800	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO	
		2 05 1 04 01 15 03	KEGIATAN:	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terlaksananya operasi layanan angkutan sampah	14.250 M3	14,250	362,000,000	14,250	362,000,000	28,500	724,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (autcam) dan kegiatan (auput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
						2019		2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)			
		2 05 1 04 01 15 05	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Persampahan	Tersedianya data persampahan dan lingkungan serta mata air dan daerah aliran sungai	3 Dokumen	3	50,000,000	3	50,000,000	6	100,000,000			
		2 05 1 04 01 15 06	3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya konstruksi Turap DAS Baadale (Perencanaan)	1 Paket	1	2,367,258,800	1	28,000,000	2	2,395,258,800			
		2 05 1 04 01 15 07	04 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber-sumber air (Perencanaan MA Nggefak, Siukoen, dan Ma Tulandale)	5 Paket	5	362,045,000	1	12,000,000	6	374,045,000			
Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan	Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB	1 04 1 04 01 16	PROGRAM : PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN	Meningkatnya Penataan dan Pengendalian Bangunan	100%		312,870,000		312,870,000		625,740,000	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO	
		1 04 1 04 01 16 01	KEGIATAN: 1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Terlaksananya penyusunan HSBGN	1 Dokumen	1	72,220,000	1	72,220,000	2	144,440,000			
		1 04 1 04 01 16 02	2 Implementasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Terlaksananya pengendalian pembangunan bangunan gedung	12 Bulan	12	240,650,000	12	240,650,000	24	481,300,000			
Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	2 05 1 04 01 16	PROGRAM : PROGRAM ANALISIS DAN INFORMASI LINGKUNGAN	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.49%	65.49%	125,000,000	65.63	197,943,000	65.63	322,943,000	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO	
		2 05 1 04 01 16 01	KEGIATAN: 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terpantaunya kualitas air tanah dan air laut	6 Titik/Lokasi MA	6	50,000,000	6	50,000,000	12	100,000,000			
		2 05 1 04 01 16 02	2 Pengkajian Dampak Lingkungan	Tersedianya pengkajian dampak lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan/usaha	Rekomendasi Lingkungan				15	72,943,000	15	72,943,000		
		2 05 1 04 01 16 04	3 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1	75,000,000	1	75,000,000	2	150,000,000			
<b>JUMLAH</b>							<b>28,110,435,700</b>		<b>23,276,882,762</b>		<b>51,387,318,462</b>			

Tabel 6.1  
Rencana program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao  
Tahun 2021-2024 Setelah Perubahan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)		
		1 04 01	<b>PROGRAM :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		3,763,826,000		3,863,826,000		4,116,326,000		4,142,026,000		15,886,004,000	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO
		1 04 01 2 01	<b>KEGIATAN :</b> 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	19	33,655,000	19	33,655,000	19	33,655,000	19	33,655,000	76	134,620,000		
		1 04 01 2 01 01	<b>SUB KEGIATAN :</b> 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja Induk, Renja Perubahan, Profil OPD, RKT, PK Induk, PK Perubahan, RAK, RKA induk, RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan	12 Dokumen	12	18,355,000	12	18,355,000	12	18,355,000	12	18,355,000	48	73,420,000		
		1 04 01 2 01 07	<b>SUB KEGIATAN :</b> 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, dan Evaluasi Renja Per Triwulan	7 Dokumen	7	15,300,000	7	15,300,000	7	15,300,000	7	15,300,000	28	61,200,000		
		1 04 01 2 02	<b>KEGIATAN :</b> 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100%		2,676,682,000		2,689,435,000		2,689,435,000		2,689,435,000	-	10,744,987,000		
		1 04 01 2 02 01	<b>SUB KEGIATAN :</b> 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	36 Orang	36	2,578,828,000	36	2,578,828,000	36	2,578,828,000	36	2,578,828,000	144	10,315,312,000		
		1 04 01 2 02 03	<b>SUB KEGIATAN :</b> 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	8 Orang	8	97,854,000	8	110,607,000	8	110,607,000	8	110,607,000	32	429,675,000		
		1 04 01 2 03	<b>KEGIATAN :</b> 3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tertatanya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Orang	1	9,000,000	2	12,500,000	2	13,000,000	2	13,500,000	7	48,000,000		
		1 04 01 2 03 02	<b>SUB KEGIATAN :</b> 3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya honor Pengelola barang milik daerah	1 Orang	1	9,000,000	2	12,500,000	2	13,000,000	2	13,500,000	7	48,000,000		
		1 04 01 2 05	<b>KEGIATAN :</b> 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	48 Orang		720,000,000		720,000,000		720,000,000		720,000,000	-	2,880,000,000		
		1 04 01 2 05 03	<b>SUB KEGIATAN :</b> 4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya tenaga kontrak daerah	48 Orang	48	720,000,000	48	720,000,000	48	720,000,000	48	720,000,000	192	2,880,000,000		
		1 04 01 2 06	<b>KEGIATAN :</b> 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100%		231,619,000		315,691,000		315,691,000		315,691,000	-	1,178,692,000		
		1 04 01 2 06 01	<b>SUB KEGIATAN :</b> 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (alat-alat listrik)	12 Bulan	12	1,060,000	12	1,060,000	12	1,060,000	12	1,060,000	48	4,240,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI	
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)			
		1 04 01 2 06 02	SUB KEGIATAN : 5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit			5	32,000,000	5	32,000,000	5	32,000,000	15	96,000,000		
		1 04 01 2 06 04	SUB KEGIATAN : 5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan/material kebersihan kantor dan alat tulis kantor	12 Bulan	12	25,541,000	12	25,541,000	12	25,541,000	12	25,541,000	48	102,164,000		
		1 04 01 2 06 05	SUB KEGIATAN : 5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	48	88,000,000		
		1 04 01 2 06 09	SUB KEGIATAN : 5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	57 Kali	57	183,018,000	60	235,090,000	60	235,090,000	60	235,090,000	237	888,288,000		
		1 04 01 2 08	KEGIATAN : 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100%		37,701,000		37,376,000		37,376,000		37,376,000	-	149,829,000		
		1 04 01 2 08 01	SUB KEGIATAN : 6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai surat menyurat	12 Bulan	12	3,625,000	12	3,300,000	12	3,300,000	12	3,300,000	48	13,525,000		
		1 04 01 2 08 02	SUB KEGIATAN : 6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet, air dan listrik	12 Bulan	12	34,076,000	12	34,076,000	12	34,076,000	12	34,076,000	48	136,304,000		
		1 04 01 2 09	KEGIATAN : 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100%		55,169,000		55,169,000		307,169,000		332,369,000	-	749,876,000		
		1 04 01 2 09 02	SUB KEGIATAN : 7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17 Unit	17	50,200,000	17	50,200,000	17	50,200,000	17	50,200,000	68	200,800,000		
		1 04 01 2 09 06	SUB KEGIATAN : 7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Laptop/PC, Printer dan AC)	9 Unit	9	4,969,000	9	4,969,000	9	4,969,000	9	4,969,000	36	19,876,000		
		1 04 01 2 09 10	SUB KEGIATAN : 7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Paket					1	252,000,000	1	277,200,000	2	529,200,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI		
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD					
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)				
		1 04 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	1 04 02	PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100%	100%	195,200,000	100%	95,200,000	100%	96,000,000	100%	97,000,000	100%	483,400,000	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO		
		1 04 02 2 03	KEGIATAN : 1 Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	1 Paket	1	195,200,000	1	95,200,000	1	96,000,000	1	97,000,000	4	483,400,000				
		1 04 02 2 03 01	SUB KEGIATAN : 1.1 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah	1 Paket	1	195,200,000	1	95,200,000	1	96,000,000	1	97,000,000	4	483,400,000				
		1 04 03	PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni	78.40%	82.87%	11,637,871,000	88.76%	20,694,381,000	94.42%	7,900,000,000	100%	20,150,000,000	100%	60,382,252,000	DPKPLH	KAB. ROTE		
		1 04 03 2 02	KEGIATAN : 1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar	Cakupan permukiman layak				1	150,000,000			1	150,000,000	2	300,000,000				
		1 04 03 2 02 02	SUB KEGIATAN : 1.1 Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya penyusunan Ranpeda tentang kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rote Ndao	Dokumen			1	150,000,000			1	150,000,000	2	300,000,000				
		1 04 03 2 03	KEGIATAN : 2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar	Cakupan permukiman layak	4.262 Unit	5,589	11,637,871,000	7,539	20,544,381,000	9,414	7,900,000,000	11,264	20,000,000,000	33,806	60,082,252,000				
		1 04 03 2 03 02	SUB KEGIATAN : 2.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan rumah layak huni	4.262 Unit	5,589	11,637,871,000	7,539	20,544,381,000	9,414	7,900,000,000	11,264	20,000,000,000	33,806	60,082,252,000				
		1 04 05	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Meningkatnya sarana dan prasarana utilitas umum	100%		89,487,000		7,680,000,000		182,000,000		184,000,000		8,135,487,000	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO		
		1 04 05 2 01	KEGIATAN : 1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan permukiman layak	10 Unit	-	89,487,000	20	7,680,000,000	30	182,000,000	40	184,000,000	90	8,135,487,000				
		1 04 05 2 01 02	SUB KEGIATAN : 1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang di Kawasan Permukiman	10 Unit	-	89,487,000	20	7,680,000,000	30	182,000,000	40	184,000,000	90	8,135,487,000				

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI			
											2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD		
											Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Kinerja	(Rp.)	
		2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	2	10	10				PROGRAM : PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas lahan bersertifikat	46.00	92.00	655,000,000	138.00	325,000,000	184.00	326,000,000	230.00	327,000,000	644.00	1,633,000,000	DPKPLH	KAB. ROTE	
		2	10	10	2	01		KEGIATAN : 1 Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penggunaan tanah	46.00	92.00	655,000,000	138	325,000,000	184	326,000,000	230	327,000,000	644.00	1,633,000,000			
		2	10	10	2	01	02	SUB KEGIATAN : 1.1 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan KJPP	1 Paket	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	4	300,000,000			
		2	10	10	2	01	03	SUB KEGIATAN : 2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Sertifikasi tanah pemerintah	46.00	92.00	580,000,000	138.00	250,000,000	184.00	251,000,000	230.00	252,000,000	644.00	1,333,000,000			
		2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2	11	02				PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya perencanaan pengendalian lingkungan hidup	Dokumen	2	320,000,000	3	1,070,000,000	3	1,070,000,000	4	1,270,000,000	12	3,730,000,000	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO	
		2	11	02	2	01		KEGIATAN : 1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,500,000,000			
		2	11	02	2	01	01	SUB KEGIATAN : 1.1 Penyusunan dan Penetapan rpplh Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Kabupaten Rote Ndao	Dokumen				1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
		2	11	02	2	02		KEGIATAN : 2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	1 Dokumen	2	320,000,000	2	570,000,000	2	570,000,000	3	770,000,000	9	2,230,000,000			
		2	11	02	2	02	01	SUB KEGIATAN : 2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya penyusunan dan validasi KLHS	1 Dokumen	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	4	480,000,000			
		2	11	02	2	02	02	SUB KEGIATAN : 2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Validasi KLHS terhadap Revisi RTRW Kab. Rote Ndao	Dokumen	1	200,000,000					1	200,000,000	2	400,000,000			
		2	11	02	2	02	03	SUB KEGIATAN : 2.3 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan	Tersedia dan tervalidasinya KLHS terhadap RTBL Kab. Rote Ndao	Dokumen				1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	3	1,350,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Kinerja	(Rp.)		
		2 11 03	PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks pencemaran air	0.68%	1.62	504,999,808	1.52	504,999,808	1.42	504,999,808	1.42	504,999,808		2,019,999,232	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO
		2 11 03 2 01	KEGIATAN : 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	100%		105,000,000		105,000,000		105,000,000		105,000,000	-	420,000,000		
		2 11 03 2 01 01	SUB KEGIATAN : 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pemantauan dan pegujian kualitas air dan kualitas udara (MA, Siukoen, MA, Tilonisi, MA, Tanggaloi, MA, Oemau, Kali Menggelama, Pelabuhan Baa, TPI Tulandale)	8 Titik	8	75,000,000	8	75,000,000	8	75,000,000	8	75,000,000	32	300,000,000		
				Pengkajian rencana usaha/kegiatan terhadap lingkungan hidup	10 Rekomendasi Lingkungan	10		10		10		10					
		2 11 03 2 01 02	SUB KEGIATAN : 1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya peringatan hari bumi	1 Kegiatan	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	120,000,000		
		2 11 03 2 02	KEGIATAN : 2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	100%		399,999,808		399,999,808		399,999,808		399,999,808	-	1,599,999,232		
		2 11 03 2 02 01	SUB KEGIATAN : 2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Tersedianya Dokumen IKPLHD	1 Dokumen	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	4	300,000,000		
		2 11 03 2 02 03	SUB KEGIATAN : 2.2 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perlindungan Mata Air Penyusunan Data Base Mata Air	3 Paket	3	324,999,808	3	324,999,808	3	324,999,808	3	324,999,808	12	1,299,999,232		
				Data base mata air	1 Paket	1								1	-		





TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (outcome) dan kegiatan (ouput)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI		
											2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra OPD	
											Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Kinerja	(Rp.)
		2	11	11				PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan sampah	29.43%	24.00	679,496,000	26.00	670,000,000	27.00	823,000,000	30.00	825,000,000		2,997,496,000	DPKPLH	KAB. ROTE NDAO
		2	11	11	2	01		KEGIATAN : 1 Pengelolaan Sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah	100%		679,496,000		670,000,000		823,000,000		825,000,000	-	2,997,496,000		
		2	11	11	2	01	01	SUB KEGIATAN : 1.1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda/Perbup tentang pengelolaan sampah dan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah	1 Dokumen	-	-	-	-	1	150,000,000	1	150,000,000	2	300,000,000		
		2	11	11	2	01	03	SUB KEGIATAN : 1.2 Pengelolaan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan dan penyediaan sarpras persampahan	1 Paket	1	679,496,000	1	670,000,000	1	673,000,000	1	675,000,000	4	2,697,496,000		
								Operasi layanan angkutan sampah		21.000 M3	21,000		21,000		21,000		21,000		84,000	-		
								Laporan pengelolaan sampah		1 Dokumen	1		1		1		1		4	-		
		Jumlah										17,966,879,808		35,024,406,808		15,141,325,808		27,625,025,808		95,757,638,232		